

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

Oleh

Ida Ayu Putu Wulandari¹, Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi², Diota Prameswari Vijaya³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: ¹ayu.wulandari.6@undiksha.ac.id, ²ayu.wulan@undiksha.ac.id,

³diota.pv@undiksha.ac.id

Article History:

Received: 26-08-2025

Revised: 16-09-2025

Accepted: 29-09-2025

Keywords:

Good Corporate
Governance,
Penggangan
Berbasis Kinerja,
Kinerja Pengelolaan
Keuangan Daerah,
OPD

Abstract: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota pada 27 OPD Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 108 sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Metode analisis diawali dengan uji prasyarat dan dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan sistem pemerintahan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi. Pada masa otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang akan menguntungkan rakyatnya. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa ada tiga misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah, yakni: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan di tingkat daerah mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan, serta menetapkan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan perangkat yang sesuai guna menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel, demi meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Pengelolaan keuangan daerah menjadi kerangka utama bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. OPD berperan sebagai pengguna

anggaran dan pelaksana kegiatan, sehingga keberhasilan program-program pembangunan sangat bergantung pada seberapa baik OPD mampu menyusun rencana anggaran, merealisasikan belanja sesuai peraturan, serta menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan daerah bukan hanya mendukung kinerja OPD, tetapi juga menjadi alat ukur akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan (Supriyanto, 2024)

Isu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kini menjadi sorotan publik, karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa berbagai upaya pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah belum memberikan hasil yang optimal dan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Rustini dkk., 2022). Dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan ini dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pemerintah Provinsi Bali. Tuntutan tersebut semakin kuat seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah dalam mengelola keuangannya. Dengan otonomi tersebut, muncul pula tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Rustini dkk., 2022).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Luas Kabupaten Buleleng mencapai 1.366 km². Berdasarkan penjabaran data yang didapat dari LKJIP Kabupaten Buleleng di tahun 2020 dan 2022 terdapat 9 OPD yang mendapat predikat “tidak mencapai target”. Sementara itu, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 menyebutkan capaian kinerja OPD Kabupaten Buleleng periode 2023 dan 2024 yang disampaikan kepada masing-masing OPD dengan hasil yaitu sebanyak 11 OPD dengan kategori BB (Sangat Baik), sebanyak 27 OPD dengan kategori B (Baik) dan 2 OPD dengan kategori CC (Cukup Memadai). Dari target yang ditetapkan sebanyak 40 OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB baru terealisasi 11 OPD dengan capaian 27,5 %.

Berbagai penelitian mengenai pengelolaan anggaran pada organisasi perangkat daerah masih terjadi ketidakkonsistenan atau berbeda-beda. Hasil penelitian dari Swandewi & Dewi (2023) ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk variabel partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Penelitian dari Septiana & Hermanto (2021) diperoleh bahwa transparansi, akuntabilitas, kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan oleh Budiati, Sugiyanto & Niati (2020) menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasif, dan kapasitas aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Juga penelitian dari Mbipi, Assih & Sumtaky (2021) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang. Penelitian diatas menunjukkan penerapan

pengelolaan keuangan serta semua fungsi manajemen tata kelola keuangan telah diterapkan secara efektif. Akan tetapi, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Artinya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai perwujudan good governance dan clean government.

Apabila pemerintah ingin dikatakan sebagai pemerintah yang baik, maka ada sistem aturan yang disebut dengan tata kelola perusahaan atau dikenal dengan Good Corporate Governance. Menurut Septiana & Hermanto (2021) menjelaskan secara definisi Good Corporate Governance (GCG) diartikan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Lebih lanjut, untuk mendukung terwujudnya Good Corporate Governance dalam sebuah organisasi, maka pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik terdapat tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan Good Corporate Governance adalah: (1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat; (3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Kabupaten Buleleng juga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan keuangan daerah. SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Keberadaan SiLPA ini seringkali menjadi indikator adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal oleh OPD, baik karena keterlambatan pelaksanaan program, perencanaan yang kurang matang, ataupun kendala teknis lainnya (Anggeadi, Diatmika & Sujana, 2023). Berdasarkan data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah SiLPA setiap tahunnya. Pada tahun 2019, SiLPA tercatat sebesar Rp 75,83 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 68,55 miliar. Tahun 2021, SiLPA kembali meningkat menjadi Rp 72,39 miliar, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 hingga Rp 55,93 miliar, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi Rp 62,11 miliar pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penyerapan anggaran, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang kurang akurat, perubahan kebijakan, atau kendala dalam pelaksanaan program (Mulyono & Hertianti, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Yulia & Ningsih (2020), salah satu kendala utama dalam penerapan anggaran berbasis kinerja adalah kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Banyak penyusun anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja berdasarkan prinsip learning by doing, tanpa didukung oleh pelatihan atau latar belakang pendidikan yang sesuai.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan variabel good corporate governance dan variabel baru yakni penganggaran berbasis kinerja (PBK) sebagai variabel independen, serta kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada tempat penelitian, yakni pada organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten buleleng. Pendekatan ini belum pernah diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Umumnya penelitian hanya fokus pada satu atau dua variabel secara terpisah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menitikberatkan perhatian pada OPD Kabupaten Buleleng yang memiliki ciri khas, tantangan, dan mekanisme pengelolaan anggaran yang berbeda.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada teori stewardship. Stewardship theory dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah selaku steward bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal mereka yaitu masyarakat (Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

Good Corporate Governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Adnyani, Julianto & Yasa, 2021). Lebih lanjut, Septiana & Hermanto (2021) menjelaskan secara definisi Good Corporate Governance (GCG) diartikan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan 36 dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur atau indikator kinerja sebagai instrumen untuk mencapai sasaran program dan tujuan yang telah di rencanakan. Juga pengelolaan anggaran dan sistem penyusunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja (Sari dkk., 2022). Menurut Suliantoro, (2023) Penganggaran Berbasis Kinerja mencakup; (1) Perencanaan kinerja (planning for performance); (2) Pengukuran kinerja (measuring performance); dan (3) Monitoring/evaluasi kinerja. Selain untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, implementasi PBK ditujukan sebagai budgetary decision-making, dimana informasi kinerja digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya yang terbatas guna penyusunan anggaran belanja.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian, tampilan maupun prestasi dari sasaran dan tujuan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk kemudian dinilai berdasar pada ukuran penilaian kinerja (Umam & Setiyowati, 2023). Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi (Armereo, 2021). Menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Didalamnya diatur mengenai bagaimana mengelola keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilangsungkan di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten

Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance dan penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Menurut Jaya (2020) penelitian kuantitatif merupakan metode yang berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan antar variabel yang memiliki karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menguji hipotesis, serta memberikan kesimpulan berbasis data numerik yang objektif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Di samping itu, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda dilakukan pengujian asumsi klasik atau prasayart yang terdiri uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Disamping itu dilakukan uji hipotesis, yakni uji parsial t dan uji koefisien determinasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota pada 27 ODP Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh 108 responden (setiap OPD diwakili oleh 4 orang, diantaranya ada PPK, PPTK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berikut di bawah ini merupakan karakteristik responden penelitian yang ditinjau dari jenis kelamin, riwayat pendidikan, dan jabatan.

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	55	52,38%
2	Perempuan	50	47,62%

Sumber: Hasil Olah Statistik (2025).

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	SMA/SMK	23	21,90%
2	Diploma	3	2,86%
3	S1	65	61,90%
4	S2	13	12,39%
5	S3	1	0,95%

Sumber: Hasil Olah Statistik (2025).

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Kriteria	Jumlah	Persentase
1	PPK	32	30,48%
2	PPTK	29	27,62%
3	Bendahara Penerimaan	20	19,05%
4	Bendahara Pengeluaran	24	22,85%

Sumber: Hasil Olah Statistik (2025).

Table 4 Hasil Statistik Deskriptif

	Jumlah (N)	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata		Std. Deviasi
				Statistik	Std. Error	
Good Corporate Governance	105	47	75	66,34	0,690	7,074
Penganggaran Berbasis Kinerja	105	47	90	78,97	0,939	9,618
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	105	16	30	26,90	0,329	3,376

Sumber: Hasil Olah Statistik (2025).

Selanjutnya dilakukan uji validitas yang digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner dalam mendefinisikan variabel. Uji validitas dilakukan dengan program Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows versi 29.0. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila $p\text{-value} < \alpha$ 0,05 (Sugiyono, 2019). Jumlah keseluruhan sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 105 responden, namun untuk dikarenakan ada beberapa data yang tidak valid, maka diperlukan outliers data, sehingga jumlah sampel yang digunakan yaitu 96 responden dengan taraf signifikasinya 5% atau 0,05.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Sig.	Pearson Correlation	Keterangan
1	<i>Good Corporate Governance (X1)</i>				
		Soal 1	<0,001	0,502	Valid
		Soal 2	<0,001	0,559	Valid
		Soal 3	<0,001	0,570	Valid
		Soal 4	<0,001	0,604	Valid
		Soal 5	<0,001	0,540	Valid
		Soal 6	<0,001	0,657	Valid
		Soal 7	<0,001	0,763	Valid
		Soal 8	<0,001	0,737	Valid
		Soal 9	<0,001	0,724	Valid
		Soal 10	<0,001	0,615	Valid
		Soal 11	<0,001	0,579	Valid
		Soal 12	<0,001	0,698	Valid
		Soal 13	<0,001	0,689	Valid
		Soal 14	<0,001	0,693	Valid
		Soal 15	<0,001	0,685	Valid
2	<i>Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)</i>				
		Soal 1	<0,001	0,714	Valid
		Soal 2	<0,001	0,725	Valid

No.	Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Sig.	Pearson Correlation	Keterangan
		Soal 3	<0,001	0,710	Valid
		Soal 4	<0,001	0,776	Valid
		Soal 5	<0,001	0,594	Valid
		Soal 6	<0,001	0,879	Valid
		Soal 7	<0,001	0,719	Valid
		Soal 8	<0,001	0,536	Valid
		Soal 9	<0,001	0,807	Valid
		Soal 10	<0,001	0,774	Valid
		Soal 11	<0,001	0,698	Valid
		Soal 12	<0,001	0,733	Valid
		Soal 13	<0,001	0,742	Valid
		Soal 14	<0,001	0,783	Valid
		Soal 15	<0,001	0,799	Valid
		Soal 16	<0,001	0,683	Valid
		Soal 17	<0,001	0,711	Valid
		Soal 18	<0,001	0,619	Valid
3	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)				
		Soal 1	<0,001	0,852	Valid
		Soal 2	<0,001	0,915	Valid
		Soal 3	<0,001	0,818	Valid
		Soal 4	<0,001	0,843	Valid
		Soal 5	<0,001	0,954	Valid
		Soal 6	<0,001	0,953	Valid

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil pada tabel menyatakan bahwa nilai Sig. (2-tailed) pada variabel *good corporate governance* (X1), penganggaran berbasis kinerja (X2), dan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Selain itu, nilai *Pearson Correlation* pada variabel *good corporate governance* (X1), penganggaran berbasis kinerja (X2), dan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) menunjukkan nilai arah positif yang artinya secara kesimpulan item-item soal kuesioner yang menjadi instrumen penelitian bersifat valid.

Setelah dilakukan uji validitas lalu dilakukan uji reliabilitas. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2018:46)

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	0,895	Reliabel
2	Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)	0,942	Reliabel
3	Kinerja Pengelolaan Keuangan	0,943	Reliabel

	Daerah (Y)		
--	------------	--	--

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil pada tabel 6 menyatakan bahwa nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel penelitian adalah lebih dari 0,7. Hal ini menyimpulkan bahwa seluruh item pada masing-masing variabel bersifat reliabel.

Selanjutnya uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data dari variabel bebas maupun terikat memiliki distribusi yang normal, yaitu distribusi yang simetris dengan nilai modus, mean, dan median berada di tengah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov. Adapun kriteria penilaian yang ditetapkan adalah jika nilai signifikansi atau probabilitas kurang dari 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal, sedangkan jika nilainya lebih dari 0,05 maka data dinyatakan distribusi normal. Hasil pada uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		96
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviaton	1,50560641
Most Extreme Differences	Absolute	0,142
	Positive	0,141
	Negative	-0,142
Test Statistic		0,142
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,061

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,061. Nilai ini menyatakan bahwa nilai Signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05. Maka, secara kesimpulan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke tahapan uji asumsi klasik berikutnya.

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam model regresi linear berganda, guna mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap asumsi klasik mengenai hubungan linear antar variabel bebas. Salah satu metode statistik yang sering digunakan dalam analisis ini adalah Variance Inflation Factor (VIF). Suatu data dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas apabila nilai VIF berada di bawah 10 dan nilai tolerance melebihi 0,1.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Tolerance</i>	<i>Statistics VIF</i>
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	0,547	1,828
Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)	0,648	2,848
Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil pada tabel 8 menyebutkan bahwa seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Collinearity Tolerance lebih besar dari 0,1. Selain itu, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Statistics VIF kurang dari 10. Hal tersebut menyimpulkan bahwa tidak

terdapat gejala multikolinearitas pada data pengamatan.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual di antara pengamatan dalam suatu model regresi. Jika varians residual seragam pada setiap pengamatan, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Namun, jika variansnya berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode statistik yang digunakan yaitu uji Glejser untuk mengidentifikasi gejala tersebut.

Tabel 9 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	0,034	1,560	0,122
Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)	-0,033	-1,809	0,074

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025)

Berdasarkan hasil tabel 9 menyatakan bahwa hasil nilai Sig adalah lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hal ini menyimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada data pengamatan.

Tabel 10 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
Konstanta	0,207		
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	0,031	0,895	0,373
Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)	0,311	10,699	<0,001

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025)

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 10, maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$$Y = 0,207 + 0,031X_1 + 0,311X_2 + e$$

Adapun, penjelasan mengenai hasil pada persamaan di atas adalah sebagai berikut: **Pada persamaan regresi**, nilai konstanta menunjukkan nilai (+) 0,207. Nilai ini menyatakan bahwa tanpa adanya variabel *good corporate governance* dan penganggaran berbasis kinerja, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai tetap sebesar (+) 0,207. Dengan maksud lain, apabila masing-masing variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen akan tetap bernilai (+) 0,207. **Nilai koefisien variabel *good corporate governance* adalah sebesar (+) 0,031**. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel penganggaran berbasis kinerja adalah bernilai tetap (konstan), maka setiap peningkatan *good corporate governance* sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar (+) 0,031. **Nilai koefisien variabel penganggaran berbasis kinerja adalah sebesar (+) 0,311**. Hal ini menunjukkan bahwa dengan asumsi variabel *good corporate governance* adalah bernilai tetap (konstan), maka setiap peningkatan penganggaran berbasis kinerja sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar (+) 0,311.

Tabel 11 Hasil Uji Parsial t

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	0,207		
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	0,031	0,895	0,373
Penganggaran Berbasis Kinerja (X2)	0,311	10,699	<0,001

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil uji parsial t yang ditunjukkan pada tabel 11 dapat dijelaskan sebagai berikut ini: **Pengaruh *Good Corporate Governance* (X1) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).** Hasil pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *good corporate governance* adalah sebesar 0,373. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Secara kesimpulan, hasil pengujian parsial t menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. **Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja (X2) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).** Hasil pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penganggaran berbasis kinerja adalah sebesar <0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05. Secara kesimpulan, hasil pengujian parsial t menyatakan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,846	0,716	0,710

Sumber: Hasil Olah SPSS (2025)

Hasil perhitungan koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 12 menyatakan bahwa nilai R Square adalah 0,651 dan nilai Adjusted R Square adalah 0,716 dan nilai Adjusted R Square adalah 0,710. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,710 memberikan gambaran yang lebih akurat karena telah menyesuaikan efek jumlah variabel dalam model. Dengan kata lain, hanya sekitar 71% dari variasi variabel dependen benar-benar dijelaskan oleh model setelah memperhitungkan kompleksitasnya. Dengan kata lain, sisanya sebesar 29% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada pada model regresi. Ini menandakan bahwa meskipun terdapat hubungan, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak terlalu besar, dan masih banyak faktor lain yang mungkin belum dimasukkan ke dalam model.

Hasil Kesimpulan Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda, uji parsial t, dan koefisien determinasi maka dapat diketahui kesimpulan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Kesimpulan Hipotesis Penelitian

Variabel	Pengaruh	Signifikan/ Tidak Signifikan	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i> (X1)	Positif	Tidak Signifikan	Hipotesis Ditolak
Penganggaran Berbasis	Positif	Signifikan	Hipotesis Diterima

Variabel	Pengaruh	Signifikan/ Tidak Signifikan	Keterangan
Kinerja (X2)			

2Sumber: Hasil Olah SPSS (2025).

Hasil kesimpulan hipotesis penelitian pada tabel 13 menyatakan bahwa:

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa “*Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Buleleng”. Hasil pada tabel 12 menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, H1 penelitian ditolak. **Hipotesis kedua (H2)** menyatakan bahwa “Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Buleleng”. Hasil pada tabel 12 menyatakan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, H2 penelitian diterima.

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel *good corporate governance* adalah 0,031. Sementara itu, hasil uji parsial t menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,373. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semakin adanya peningkatan penerapan *good corporate governance*, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengelolaan pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana investasi serta praktik korupsi, baik dalam ranah politik maupun administratif (Eni, 2020). Di samping itu, menurut Haryanto, dkk (2022) menjelaskan bahwa *good corporate governance* memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar bisa mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan atau kewenangan yang diperlukan oleh suatu perusahaan demi menjamin keberlangsungan dan eksistensi serta tanggungjawab kepada stakeholder. GCG menekankan pentingnya disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan kegiatan usaha. Konsep ini berlandaskan pada proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, pengelolaan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Fenomena yang terjadi di OPD kabupaten buleleng, seperti halnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya peran gcg yang tentunya sangat penting dalam sistem pemerintahan, untuk mencapai hal tersebut, setiap OPD membuat yang namanya Renstra (rencana strategis) biasanya berisikan dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahun) memuat hal-hal seperti visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, setiap tahun akan dibuatkan hasil capaian kinerja tersebut dalam laporan berupa LKJIP (laporan Kinerja Instansi pemerintah). Pada hasil yang didapatkan ternyata

untuk di buleleng capaian kinerja tersebut masih belum maksimal untuk di setiap OPD. Capaian kinerja tahun 2020 dan 2022 terdapat 9 OPD yang tidak mencapai target, tahun 2023-2024 terdapat 27 OPD dengan hasil kategori baik, 2 OPD dengan kategori cukup memadai. Sisanya hanya 11 OPD yang baru mampu merealisasikan kinerja dengan sangat baik. Namun melihat kondisi tersebut masih dinyatakan belum maksimal. Hal ini sudah dijelaskan di Bab 1. Berdasarkan hal tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan GCG hanya sebatas pada syarat administratif, bukan sebagai budaya kerja. Ini dapat diketahui pada kurangnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara beberapa sumber pada OPD bersangkutan:

“Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh SKPD bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar, sehingga tidak semua pegawai di SKPD dapat berkontribusi dalam proses tersebut. Penyusunan anggaran hanya dikoordinasikan oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Penyusunan Daerah) dan dalam Rencana Anggaran Penyusunan Daerah yang disampaikan kepada Sekda (selaku kepalanya atau ketua) Bappeda, dan BPKPD sebagai anggotanya. Laporan yang dapat diakses publik umumnya berupa LKPJ yang tidak bersifat terperinci, sedangkan pertanyaan dari pihak berkepentingan hanya dilayani sesuai kewenangan. Pertanggungjawaban keuangan dilaporkan ke BPKPD dalam bentuk laporan resmi, sementara pihak terkait atau pejabat yang berwenang seperti PPTK memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan, dan bendahara hanya menyampaikan sesuai tugasnya karena kewenangan penuh berada pada bagian perencanaan.”

Inefisiensi dalam pengelolaan anggaran sering kali menjadi penyebab utama dari lemahnya tata kelola pemerintahan serta meningkatnya potensi korupsi (Darmawan, dkk. 2025). Indikator kinerja anggaran biasanya lebih menekankan pada efisiensi, yaitu bagaimana anggaran digunakan secara optimal dengan pengeluaran seminimal mungkin. Sementara itu, indikator GCG lebih berfokus pada aspek tata kelola, transparansi, dan pengendalian internal yang baik. Implementasi GCG seringkali membutuhkan biaya tambahan, seperti pelatihan, audit, dan sistem pengawasan, yang bisa bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, GCG hanya diimplementasikan secara simbolis atau substansial di permukaan saja, misalnya hanya sebatas dokumen kebijakan atau slogan etika tanpa penerapan nyata dalam budaya kerja dan pengambilan keputusan. Ketika GCG dijalankan hanya sebagai formalitas, maka efektivitasnya dalam mendukung tata kelola yang baik pun menjadi dipertanyakan.

Hasil penelitian oleh Rahman & Rachman (2021) sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di kota Makassar. Indikator yang paling kuat berpengaruh dalam pembentukan *good governance* adalah akuntabilitas, dapat dilihat seluruh SKPD memperhatikan indikator ini dalam pembuatan anggaran maupun laporan keuangan. Indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat dalam pembentukan *good governance* adalah partisipasi, dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung belum aktif berperan dalam pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan sehingga berpengaruh dalam kinerja SKPD.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel penganggaran berbasis kinerja adalah 0,264. Sementara itu, hasil uji parsial t menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $<0,001$. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semakin adanya peningkatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran publik dengan cara menghubungkan alokasi dana pada organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai, melalui pemanfaatan informasi kinerja secara sistematis (Sari dkk., 2022). Melalui pemanfaatan informasi kinerja secara sistematis, anggaran tidak lagi disusun semata-mata berdasarkan input atau kebiasaan historis, melainkan berdasarkan capaian kinerja yang diharapkan. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja mendorong akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih rasional dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas program dan kegiatan pemerintah, serta menjadi alat kontrol yang penting dalam mencegah pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fenomena yang terjadi di OPD kabupaten Buleleng yaitu masih tingginya penyerapan anggaran setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena pemerintah belum maksimal mengalokasikan anggaran ke setiap program yang ada, maka terjadilah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Kemudian penempatan ASN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan juga bisa terjadinya ketidakefisienan, dimana dalam penganggaran berbasis kinerja ini peran SDM sangatlah penting, PBK ini mengacu pada penggunaan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang dicapai. Namun pada nyatanya kondisi di lapangan justru membuahkan hasil yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anwar & Retno (2019) mengungkapkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem anggaran ini memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat dicapai melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yang menekankan pencapaian tujuan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dengan kata lain, kinerja keuangan akan membaik apabila tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai, dan sebaliknya, kegagalan dalam mencapai tujuan dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi, maka hasil kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa: **Good corporate governance** berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah; **Penganggaran berbasis kinerja** berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

SARAN

Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian maka Pemerintah Kabupaten Buleleng disarankan untuk lebih memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Untuk itu, optimalisasi penganggaran berbasis kinerja perlu menjadi prioritas, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian hasil. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait penyusunan anggaran. Pengembangan sistem informasi kinerja yang terintegrasi akan sangat membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan secara efektif, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan berbasis data.

Bagi Peneliti Berikutnya

Berdasarkan hasil penelitian, kepada peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, studi perbandingan antar daerah dapat menjadi alternatif menarik untuk melihat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan dalam berbagai konteks pemerintahan. Penelitian jangka panjang atau longitudinal juga direkomendasikan untuk menilai dampak berkelanjutan dari penerapan GCG dan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap stabilitas dan kualitas kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adnyani, K.W., Julianto, I.P. & Yasa, I.N.P. (2021) 'Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, GCG, dan Keberadaan Awig-Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Dengan Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(02), pp. 413–424.
- [2] Anggeadi, I.B., Diatmika, I.P.G. & Sujana, E. (2023) 'Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), pp. 920–933. Available at: <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.67744>.
- [3] Anugeraheni, N.K.D. & Yuniarta, G.A. (2022) 'Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), pp. 426–437.
- [4] Armereo, C. (2021) 'Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang', *Jurnal Ekombis Review*, 9(2), pp. 241–254.
- [5] Budiati, Y., Sugiyanto, E.K. & Niati, A. (2020) 'Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(4), pp. 425–444. Available at: <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>.
- [6] Esni, M.T., Made, A. & Wulandari, R. (2020) 'Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

- Kota Malang', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i2.4254>.
- [7] Jaya, i made laut mertha (2020) *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualit/yZ8KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+kuantitatif&printsec=frontcover.
- [8] Mardiasmo (ed.) (2018) *OTONOMI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. III. Yogyakarta: ANDI. Available at: https://books.google.co.id/books?id=6_BBEEAAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- [9] Mbipi, S.D., Assih, P. & Sumtaky, M. (2021) 'Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah', *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), pp. 152–158. Available at: <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>.
- [10] Mulyono, A.A. & Hertianti, A. (2019) 'Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), pp. 275–290.
- [11] Rustini, N.K.A. dkk. (2022) 'The Implementation of Good Corporate Governance in BUMD Institutions', *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(02), pp. 431–436. Available at: <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i2-22>.
- [12] Sari, M.D. dkk. (2022) 'Penganggaran berbasis kinerja pengawasan prefentif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Aceh utara', *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), p. 78. Available at: <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6708>.
- [13] Septiana, S. & Hermanto, S.B. (2021) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(10), pp. 1–22.
- [14] Sirait, L.R.N., Delvianti & Ardiany, Y. (2022) 'Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Jurnal Pareso*, 4(1), pp. 169–186.
- [15] Suliantoro, I. (2023) 'Penganggaran Berbasis Kinerja: Antara Indonesia dan Korea Selatan', *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), pp. 26–42. Available at: <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i1.2153>.
- [16] Supriyanto, B.E. (2024) *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH*. Available at: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3799-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-dana-transfer-ke-daerah.html?utm_source=chatgpt.com%0A%0A.
- [17] Swandewi, K.D. & Dewi, N.A.W.T. (2023) 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(04), pp. 1132–1143. Available at: <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>.
- [18] Syukur, S.R. dkk. (2022) 'Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan', 5(2), pp. 385–405. Available at: <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.345>.
- [19] Umam, M.S. & Setiyowati, A.D. (2023) 'Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi ,

Komitmen Aparatur , Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah The Effect of Accountability , Transparency , Apparatus Commitment , and Compliance with Regulations on Regional Apparatus Performance', 19(1), pp. 91–102.

- [20] Yulia, A. & Ningsih, E.S. (2020) 'Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), pp. 50–58. Available at: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN